

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
ALOKASI BELANJA MODAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD FERLY HERDIANSYAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2016**

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE FACTORS THAT INFLUENCE THE ALLOCATION OF CAPITAL EXPENDITURES AND ITS IMPLICATIONS ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENTS AT DISTRICT/CITY IN SUMATERA

By:

MUHAMMAD FERLY HERDIANSYAH

This study aims to determine how factors such as PAD, intergovernmental revenue, economic growth, and SiLPA influence the allocation of capital expenditures and its impact on the financial performance of district/city's governments.

The sampling method used in this research is purposive sampling method and has obtained samples about 141 local government districts/cities in Sumatera during the 2009-2013 period. The results of this study explains that PAD, intergovernmental revenue, economic growth and SiLPA simultaneously effect on capital expenditures. Individually intergovernmental revenue and SiLPA have positive effect on capital expenditures, while revenue and economic growth have no effect on the allocation of capital expenditures. The allocation of capital expenditures also effect on the financial performance of local government districts/cities in Sumatra.

Keywords: revenue, intergovernmental revenue, economic growth, capital expenditures, financial performance.

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMEPNGARUHI ALOKASI BELANJA MODAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA

Oleh

MUHAMMAD FERLY HERDIANSYAH

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor seperti PAD, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, dan SiLPA mempengaruhi alokasi belanja modal dan dampaknya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel penelitian sebanyak 141 pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera selama periode 2009-2013. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara simultan PAD, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan SiLPA berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Secara individual dana perimbangan dan SiLPA berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Alokasi belanja modal juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera.

Kata Kunci : Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, alokasi belanja modal, kinerja keuangan.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
ALOKASI BELANJA MODAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA**

Oleh

MUHAMMAD FERLY HERDIANSYAH

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA MODAL
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Ferly Herdiansyah**

No. Pokok Mahasiswa : 1211031055

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



1. Komisi Pembimbing

Rogi
Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.
NIP 19750620 200012 2 001

Ninuk
Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., CA., Akt.
NIP 19820220 200812 2 003

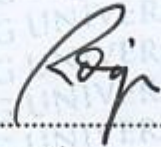
2. Ketua Jurusan Akuntansi

Fajar
Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19710802 199512 2 001

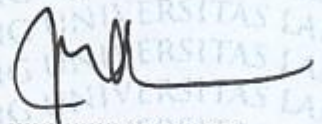
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

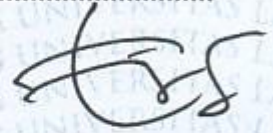
Ketua : Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.



Sekretaris : Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., CA., Akt.



Penguji Utama : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 Mei 2016

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Mei 2016

Penulis,



Muhammad Ferly Herdiansyah
NPM 1211031055

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Palembang tanggal 29 Juni 1994 sebagai putra pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan M. Ahasukherus dan Suzana.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Al-Kautsar tahun 2000, SD Al-Kautsar tahun 2006, SMP Negeri 2 Bandar Lampung tahun 2009, dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2012. Selama menjadi mahasiswa penulis terdaftar menjadi anggota aktif dalam UKM Himakta (Himpunan Mahasiswa Akuntansi dan Pajak) tahun 2012-2016. Selain itu, penulis juga aktif dalam UKMF KSPM (Kelompok Studi Pasar Modal) sebagai anggota pada periode 2012-2013, diteruskan sebagai Sekretaris Bidang I (Pendidikan dan Pengkaderan) periode 2013-2014 serta diamanahkan sebagai Ketua Bidang I (Pendidikan dan Pengkaderan) periode 2014-2015.

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
(QS: Al-Insyirah:6)

Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu
(QS: Al-Baqoroh:53)

Jika kamu tak tahan lelahnya belajar, maka bersiaplah menanggung perihnya
kebodohan
(Imam Syafi'i)

Jangan berhenti berharap, karena Allah lebih tau saat yang tepat mengabulkan
doa-doamu
(Anonymous)

Pray, because Allah always listens.
(Anonymous)

PERSEMBAHAN

لِلَّهِ الْعَالَمِينَ

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang membimbingku selama ini.

Karya ini kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda M. Ahasukherus dan Ibunda Suzana

Saudara Sekandung Maulana Yunior Hersuna

Teman, *Partner* dan Sahabat Tersayang

Keluarga Besar Jurusan Akuntansi

Serta

Almamaterku Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan semua ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. sebagai Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, masukan, arahan dan nasihat serta perhatian yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi.
5. Ibu Ninuk Dewi K, S.E., M.Sc., CA., Akt. sebagai Dosen Pembimbing Kedua, yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan saran-sarannya selama proses penyelesaian skripsi.
6. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Penguji, atas masukan, arahan, dan nasihat yang telah diberikan untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan proses belajar.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan di Jurusan Akuntansi atas semua bimbingan, pengajaran, pelayanan, dan bantuan yang telah diberikan.
9. Kedua orang tua, Mama (Suzana) dan Papa (M. Ahasukherus) yang tiada bosan-bosannya lantunan doa terucap demi kesuksesan dan keberhasilanku. Terima kasih atas dukungan, do'a, motivasi, serta inspirasinya yang tak henti-hentinya selama ini.
10. Adik kandung, Maulana Yunion Hersuna yang selalu memberi dukungan dan doa dalam kelancaran proses kuliah dan penyelesaian skripsi ini.
11. Keluarga (Alm) A. Hadi dan (Alm) Adli Duna dan seluruh sanak keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik dan lancar.

12. Sahabat karibku *Pance*, Rexi Rosandi, Sylvester, Fauzan Aditya, I Made Agung, Haris Rizqi S, M. Riyadhi, Febri Romadon, Fazrin Antasari, Argi Seto, Mufhti Ali, M. Rahadian, Andesni Reza, Miftahul Huda, Selverico Sutanto, Ahmad Marulloh, semoga selalu terjaga kekerabatan yang gokil ini.
13. Wanita-wanita dari jaman baheula, Dwi Mayasari, Devina Octarrum, Rama Dewi Fitrianti, Almira, Firstiana Putri, dan Pralestika Dwi terima kasih lawakan, keresahan, dan seluruh kisahnya.
14. *Konyas Ganjil*, Elvi Riali, Rossinda Budianti, Susi Baggus Z, Dian Kusuma Dewi. *Gelinak*, Evi Krismayanti, Puji Kurnia Putri, Elia Rahma, Mia Meisiska, Sri Wahyuni. Kalian terempong sedunia, terima kasih untuk warna dalam perkuliahan dan selanjutnya ya.
15. Bapak dan *bibique*, Aulia Ikmal, Rio Bristian, Hadqiz, Muthia Prima N, Priska Wahyurininta, Nabila Anwar, Memes, Erly, Marissa, Maretha, Fina, Riri, Yuthika jangan pernah berhenti bersuara, kalian jawara terbaiknya, terima kasih.
16. Kanda-kanda, Naufal Graisman, M. Fakhrol Arifin, Hadi Rachman dan Yunda *Giriband*, Trida Himma Zevita, As Shaumi Gahara, dan Rizky Zakiyah, terima kasih semua dukungan, bantuan dan kisah selama ini semoga sukses.
17. Tutor-tutor terbaik, Dwi Astuti, Fatkhur Rohman, Ani Widyawati, Puspita Ayu, Rizki Putera Kesuma, Mafiana Annisya terima kasih atas ilmu dan pengalaman kalian, sangat bermanfaat semoga jadi amal jariyah. Aamiin.
18. *Kance in crime*, Ferryansyah Sindy, Claudia, AnggieOctv, Nadia Fitri, Opi, Ayu, Bima, Ray, Citra dan penunggu setia gedung E kalian luar biasa, terima kasih semangat dan dukungannya.

19. Teman-teman S1 Akuntansi 2012, Adel, Hanief, Pandu, Donny, Abe, Apri, Azis, Claudius, Esa, Esti, Ersyah, Eka, Eva, Liana, Nurul, Dila, Fatur, Firda, Widya, Umi, Tarra, Indah, Heni, Pipit, Intan, Sakinah, Digo, Wanto, Yusti, Hidayana, Mahipal. Ori, Wayan, Abin, Rahmah, Mute, Dewo, Robert, Ica, Lehan, Tiwi, Ulin, Wulan, Yohanes, Dessi, Yunita, Digun terima kasih dan sukses untuk kita semua, aamiin.
20. *The best partner in crime*, Yosela Nalamba, terima kasih dukungan dan supprot serta doa selama ini, Alhamdulillah.
21. Keluarga besar KSPM FEB Unila, Kanda-kanda dan yunda-yunda serta Danty, Ria, Puspa, Mitha, Ruri, Rifka, Robi, Arum, Fabio, Ghanes, Qiu, Sigit, dan lainnya kalian luar biasa, terima kasih pengalaman hidup bersamanya *all the best!*
22. Kakak-kakak, Bunda and the genk, Kak Ester, Kak Anun, Kak Alya, Kak Dara, Kak Ata, Kak Alif, Kak Bily, dll dan adik-adik, (Humba-Humba) Anis, Samie, Ayu, Nadya, Melati, Monic, Uli, Gusti, AyuLut, Mesfi, (Skubal) Eel, Tegar, Arini, Aliva, Dhissa, Fani, Rume, Nasa, (Illusion) Rere, Ghanes, Mesfi, kalian semua terbaaaiks!
23. Kance seperjuangan, Fahmi Alzie Putra dan Gita Purna Rae W. dan KKN Pesawaran Indah, Nico, Mirta, Nisa, Keke, Egy, Romi, Eri, Rika, Fenti terima kasih atas dukungan dan support serta pengalamannya, semoga kalian sukses!
24. Kemarin baru kenal, Ulfa, Herry, Denta, Icak, Aldo terima kasih *sist, bro!* He dan *crazy in crime* Belinda dan Sigit!! Semoga kita semua sukses, aamiin.
25. Seluruh teman, kerabat dan pihak lainnya yang tak bisa disebutkan satu per satu, kalian semua luar biasa.

Penulis berdoa semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru kepada setiap orang yang membacanya.

Bandar Lampung, 29 Mei 2016

Penulis,

Muhammad Ferly Herdiansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan dan Batasan Masalah.....	8
1.2.1 Rumusan Masalah.....	8
1.2.2 Batasan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	11
II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	
2.1 Landasan Teori.....	12

2.1.1	<i>Agency Theory</i>	12
2.1.2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	14
2.1.3	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	15
2.1.4	Belanja Modal.....	16
2.1.5	Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.1.6	Dana Perimbangan.....	18
2.1.7	Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.1.8	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....	20
2.1.9	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	20
2.2	Penelitian Terdahulu.....	22
2.3	Kerangka Pemikiran.....	25
2.4	Pengembangan Hipotesis.....	25
2.4.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah.....	25
2.4.2	Pengaruh Dana Perimbangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah.....	26
2.4.3	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah.....	27
2.4.4	Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah.....	29
2.4.5	Pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	30

III. METODE PENELITIAN

3.1	Populasi dan Sampel.....	32
-----	--------------------------	----

3.2	Jenis dan Sumber Data.....	33
3.3	Definisi Operasional Variabel.....	33
3.3.1	Variabel Dependen.....	33
	a. Belanja Modal.....	33
	b. Kinerja Keuangan.....	34
3.3.2	Variabel Independen.....	35
	a. Pendapatan Asli Daerah.....	36
	b. Dana Perimbangan.....	36
	c. Pertumbuhan Ekonomi.....	37
	d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....	37
3.4	Metode Analisis.....	38
3.4.1	Analisis Faktor.....	38
3.4.2	Statistik Deskriptif.....	39
3.4.3	Uji Asumsi Klasik.....	40
	a. Uji Normalitas.....	40
	b. Uji Autokorelasi.....	40
	c. Uji Multikolinieritas.....	41
	d. Uji Heteroskedastisitas.....	42
3.4.4	Analisis Regresi Linier Berganda.....	42
3.4.5	Pengujian Hipotesis.....	43
	a. Koefisien Determinasi.....	43
	b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	44
	c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	44

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Analisis Data.....	46
4.2	Analisis Faktor.....	47
4.3	Statistik Deskriptif.....	50
4.4	Pengujian Asumsi Klasik.....	52
4.4.1	Uji Normalitas.....	52
4.4.2	Uji Autokorelasi.....	62
4.4.3	Uji Multikolinieritas.....	74
4.4.4	Uji Heteroskedastisitas.....	76
4.5	Pengujian Hipotesis.....	79
4.5.1	Koefisien Determinasi.....	79
4.5.2	Uji Statistik F.....	80
4.5.3	Uji Hipotesis (Uji Statistik t).....	82
4.6	Pembahasan.....	85
4.6.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah.....	85
4.6.2	Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah.....	86
4.6.3	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah.....	87
4.6.4	Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah.....	88
4.6.5	Pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	89

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	93
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	94
5.3	Saran.....	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Daftar Variabel-Variabel dalam Penelitian dan Indikator.....	38
Tabel 3.2 Pengukuran Autokorelasi <i>Durbin-Watson</i> (DW-Test).....	41
Tabel 4.1 Kriteria Sampel.....	47
Tabel 4.2 Hasil Uji <i>Kaiser-Meyer-Olkin</i> dan <i>Barlett's Test of Sphercit</i>	48
Tabel 4.3 Hasil Anti-Image, Total Variance Explained, Component Matrix	49
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif.....	50
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	55
Tabel 4.6 Hasil Transformasi Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	57
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	59
Tabel 4.8 Hasil Transformasi Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	61
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi Model Regresi I.....	62
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi <i>Run Test</i>	62
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi dengan Variabel Independen Terpisah Model Regresi I.....	63
Tabel 4.12 Hasil Cochrane Orcutt <i>two-step Procedure</i>	64
Tabel 4.13 Nilai ρ pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	65
Tabel 4.14 Hasil Tranformasi Metode Theil-Nagar.....	65
Tabel 4.15 Hasil Cochrane Orcutt <i>two-step Procedure</i>	66

Tabel 4.16 Nilai ρ pada Dana Perimbangan (DANPER).....	67
Tabel 4.17 Hasil Tranformasi Metode Theil-Nagar.....	67
Tabel 4.18 Hasil Cochrane Orcutt <i>two-step Procedure</i>	68
Tabel 4.19 Nilai ρ pada Pertumbuhan Ekonomi (PE).....	69
Tabel 4.20 Hasil Tranformasi Metode Theil-Nagar.....	69
Tabel 4.21 Hasil Cochrane Orcutt <i>two-step Procedure</i>	70
Tabel 4.22 Nilai ρ pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).....	70
Tabel 4.23 Hasil Tranformasi Metode Theil-Nagar.....	71
Tabel 4.24 Nilai <i>Durbin-Watson</i> (DW-Test).....	71
Tabel 4.25 Hasil Uji Autokorelasi Model Regresi II.....	72
Tabel 4.26 Hasil Cochrane Orcutt <i>two-step Procedure</i>	73
Tabel 4.27 Nilai ρ pada Belanja Modal (BM).....	73
Tabel 4.28 Hasil Tranformasi Metode Theil-Nagar.....	74
Tabel 4.29 Hasil Uji Multikolinieritas Model Regresi I.....	75
Tabel 4.30 Uji Glejser Model Regresi I.....	77
Tabel 4.31 Uji Glejser Model Regresi II.....	78
Tabel 4.32 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Regresi I.....	79
Tabel 4.33 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Regresi II.....	80
Tabel 4.34 Hasil Uji Statistik F Model Regresi I.....	81
Tabel 4.35 Hasil Uji Statistik F Model Regresi II.....	82
Tabel 4.36 Hasil Uji t Model Regresi I.....	83
Tabel 4.37 Hasil Uji t Model Regresi II.....	84
Tabel 4.38 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis.....	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera Tahun 2010-2014 (dalam ratusan juta rupiah).....	4
Gambar 1.2 Grafik Alokasi Belanja Modal pada Provinsi di Indonesia Tahun 2013.....	5
Gambar 1.3 Grafik Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2013.....	6
Gambar 2.1 Model Penelitian.....	25
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Model Regresi I (Grafik Histogram).....	53
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Model Regresi I (Grafik P-P Plot).....	54
Gambar 4.3 Hasil Transformasi Uji Normalitas Model Regresi I (Grafik Histogram).....	56
Gambar 4.4 Hasil Transformasi Uji Normalitas Model Regresi I (Grafik P-P Plot).....	56
Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas Model Regresi II (Grafik Histogram).....	58
Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas Model Regresi II (Grafik P-P Plot).....	58
Gambar 4.7 Hasil Transformasi Uji Normalitas Model Regresi II (Grafik Histogram).....	60
Gambar 4.8 Hasil Transformasi Uji Normalitas Model Regresi II (Grafik P-P Plot).....	60

Gambar 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Regrei I.....	76
Gambar 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Regresi II.....	78
Gambar 4.11 Hasil Hipotesis.....	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Sampel Penelitian
Lampiran II	Data Observasi dan Variabel Penelitian
Lampiran III	Analisis Faktor
Lampiran IV	Statistik Deskriptif
Lampiran V	Uji Normalitas
Lampiran VI	Uji Autokorelasi
Lampiran VII	Uji Multikolinieritas
Lampiran VIII	Uji Heteroskedastisitas
Lampiran IX	Koefisien Determinasi
Lampiran X	Uji Statistik F
Lampiran XI	Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Reformasi dalam bidang sektor publik di Indonesia setelah adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan adanya otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan dalam pemberian wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing dalam bentuk pengelolaan keuangan yang mandiri. Bentuk pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah ditujukan untuk program dan kegiatan pemerintah, penyediaan sarana dan prasarana publik, dan juga pelayanan untuk masyarakat.

Otonomi daerah memiliki prinsip-prinsip demokratisasi, transparansi, akuntabilitas publik, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengatur dan mengelola sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing dalam bentuk kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Bentuk pengelolaan keuangan dalam otonomi daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengalokasian dalam anggaran harus memperhatikan dan mencerminkan prioritas pembangunan untuk kepentingan publik, daerah pemilihan anggota parlemen, dan peningkatan efektifitas dan efisiensi keuangan daerah (Rubin, 1993 dalam Abdullah dan Junita, 2015). Anggaran sendiri pada dasarnya disusun untuk hal perencanaan keuangan yang berupa sumber-sumber penerimaan (pendapatan) dan pengalokasian dalam bentuk pengeluaran daerah (belanja). Proses penganggaran pemerintah daerah di Indonesia, belanja (*expenditures*) dapat dianggarkan setelah memperoleh adanya kepastian atas sumber pendanaannya (Abdullah dan Rona, 2015). Di dalam APBD sendiri terdapat tiga komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Meskipun sudah lebih dari sepuluh tahun pelaksanaan otonomi daerah, masih banyak permasalahan otonomi seperti pemekaran daerah yang masih belum bisa mandiri dan kurangnya dalam pengelolaan sumber daya alam daerahnya.

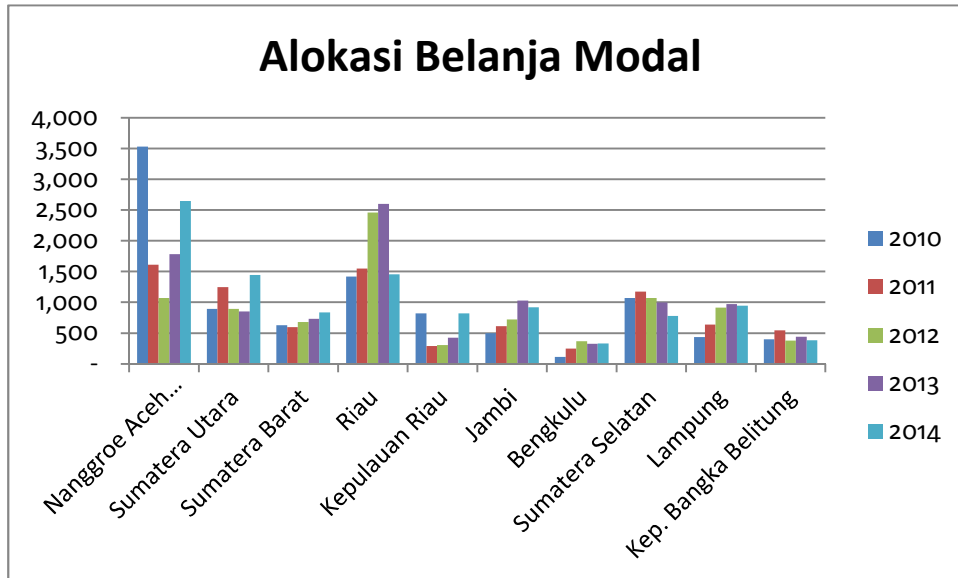
Pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dalam meningkatkan kinerja daerahnya, sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan (*revenues*) yang berasal dari potensi daerahnya sendiri disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 memiliki komponen terdiri dari, pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam perjalanan pelaksanaannya, PAD yang dihasilkan oleh sebagian besar daerah kabupaten/kota di Indonesia masih memiliki persentase yang kecil dibandingkan dengan pengeluaran atau pembiayaan. Oleh karena itu, masih diperlukan bantuan transfer dana pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana perimbangan juga disebut dengan *intergivermental revenue* atau *grant* yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DHB Pajak), dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA).

Kedua sumber pendanaan tersebut masih sangat sulit untuk dipisahkan, dikarenakan pemerintah daerah yang masih bergantung dengan pemerintah pusat serta masih minimnya total PAD yang dihasilkan oleh masing-masing daerah, dimana pendanaan tersebut digunakan untuk semua kegiatan pelaksanaan pemerintah daerah dalam bentuk belanja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 belanja dibedakan menjadi dua komponen, yaitu belanja operasional dan belanja modal. Seperti yang sudah dijelaskan, anggaran digunakan untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik seperti bidang infrastruktur yang secara langsung akan berpengaruh dalam peningkatan dan kemajuan daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai tolak ukur suatu daerah dalam melihat peningkatan pembangunan. Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur yang ada untuk menunjang kegiatan perekonomian dan hal tersebut dianggarkan dalam bentuk belanja modal. Belanja modal sendiri terdiri dalam beberapa komponen seperti belanja tanah, gedung, bangunan, irigasi, jaringan, dan lainnya. Hal-hal tersebut lah yang dirasa menunjang daerah untuk meningkatkan kegiatan dan akan berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat serta pendapatan daerah akan mengalami kenaikan.

Gambar 1.1
 Grafik Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera
 tahun 2010-2014 (dalam ratusan juta rupiah):



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, data diolah (2016)

Dilihat dari Gambar 1.1, grafik di atas menunjukkan bahwa total alokasi belanja modal dari tahun 2010-2014 dan dapat dilihat bahwa provinsi yang memiliki alokasi belanja modal paling tinggi setiap tahunnya yaitu provinsi Nanggroe Aceh Darussalam beserta Sumatera Utara dan yang paling rendah yaitu provinsi Bengkulu. Ada provinsi yang dalam pengalokasian belanja modal konsisten tiap tahun meningkat yaitu provinsi Sumatera Barat, Jambi, dan Lampung sedangkan setiap tahun terjadi pengurangan alokasi yang konsisten yaitu provinsi Sumatera Selatan dan sisanya terjadi ketidak konsistenan setiap tahunnya. Dengan adanya kenaikan dan penurunan yang stabil maupun fluktuasi di setiap provinsi yang berbeda menimbulkan asumsi bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat alokasi belanja modal di daerah kabupaten/kota di Sumatera.

Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (2013) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, pemerintah pusat terus menghimbau dan menargetkan pemerintah daerah (pemda) agar persentasi alokasi belanja modal terus ditingkatkan minimal sebesar 30 persen. Sayangnya, masih banyak pemda yang merasa kesulitan untuk mencapai target tersebut. Berikut Gambar 1.2 mengenai alokasi belanja modal:

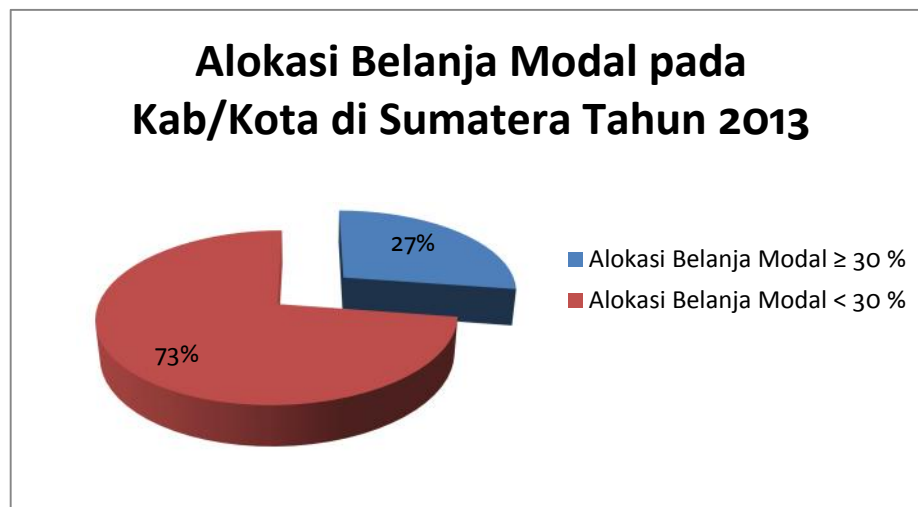
Gambar 1.2
Grafik Alokasi Belanja Modal pada Provinsi di Indonesia Tahun 2013



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, data diolah (2016)

Grafik di atas menjelaskan bahwa dalam pengalokasian belanja modal pada APBD 2013 di setiap provinsi dan 76% provinsi di Indonesia masih belum mengalokasikan belanja modal dalam APBD hingga 30%. Provinsi dengan alokasi belanja modal terbesar yaitu pada provinsi Kalimantan Selatan dengan 37% dan tingkat alokasi paling rendah yaitu provinsi Jawa Timur dengan 9%.

Gambar 1.3
Grafik Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Tahun 2013



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, data diolah (2016)

Grafik 1.3 menjelaskan bahwa pengalokasian belanja modal yang dibawah 30% pada kabupaten/kota di Sumatera sebesar 73% atau 112 kabupaten/kota dengan total 154 kabupaten/kota. Pengalokasian belanja modal terbesar ada di Kabupaten Ogan Ilir, Tanjung Jabung Barat dan Labuhanbatu Selatan yaitu 44% di tahun 2013. Alokasi terendah pada Kota Langsa yaitu 12%.

Seharusnya, alokasi belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Struktur belanja modal pun perlu mendapat perhatian khusus, karena tidak semua belanja modal berefek pada pelayanan publik. Untuk itu, belanja modal perlu dibedah lebih rinci untuk menemukan belanja modal yang berefek pada pelayanan publik, misalnya belanja modal infrastruktur.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Fadhlili (2015) untuk meneliti kembali pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi terhadap belanja daerah.

Penelitian oleh Fadhlili (2015) menunjukkan hasil bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah namun pertumbuhan ekonomi tidak secara signifikan berpengaruh ke belanja daerah. Di penelitian tersebut terdapat tiga variabel, yaitu PAD, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi.

Pada penelitian ini masih menggunakan ketiga variabel tersebut dengan menambahkan satu variabel lagi yaitu Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) karena SiLPA merupakan salah satu dana hasil dari sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam pengalokasian belanja modal tahun selanjutnya dan menggantikan variabel belanja daerah dengan belanja modal karena dilihat dari perbandingan pengalokasian belanja modal dengan belanja operasi, belanja modal masih tidak terlalu dipertimbangkan, padahal belanja modal sangat menunjang pembangunan secara keseluruhan terutama untuk kabupaten/kota yang sedang berkembang. Dilihat dari penelitian Nurachman (2015) bahwa SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal untuk kab/kota di Jawa Barat, sama juga halnya dengan penelitian Sugiardi dan Supadmi (2014) untuk kab/kota di Bali. Begitu pula dengan variabel pertumbuhan ekonomi yang masih dipertahankan untuk menjadi variabel, dimana berdasarkan hasil penelitian Farel (2015) pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Kinerja keuangan juga menjadi salah satu indikator dalam pengukuran kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya, berdasarkan penelitian Al Qadar (2014) belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, untuk itu dalam model penelitian ini nantinya akan mengukur pengaruh dari keempat variabel (PAD, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, dan SiLPA) pada tahun t terhadap alokasi belanja modal di periode selanjutnya ($t+1$) serta menguji pengaruh dari alokasi belanja modal tersebut terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada periode yang sama ($t+1$). Alokasi belanja modal dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel mediasi atau *intervening*, namun hanya untuk pengaruh tidak langsung antar variabel X terhadap Z. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera”**.

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, peneliti ingin menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal dan implikasinya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, adapun rumusan masalah penelitian ini:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah?

2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah?
4. Apakah sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah?
5. Apakah alokasi belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.2.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat batasan-batasan masalah agar masalah yang akan diteliti tetap fokus dan tidak meluas ke arah masalah-masalah yang lain. Batasan masalah penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan pada seluruh kabupaten dan kota di Sumatera (Nanggroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung)
2. Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) teraudit yaitu dari Laporan Realisasi Anggaran 2009-2013 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2010-2014.

3. Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota yang melaporkan data pertumbuhan ekonomi dan di publikasikan di *website* Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat atau masing-masing *website* BPS kabupaten/kota.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah.
2. Seberapa besar pengaruh dana perimbangan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah.
3. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah.
4. Seberapa besar pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah.
5. Seberapa besar pengaruh alokasi belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya dan bisa menjadi sumber referensi dalam melakukan penelitian

selanjutnya dikemudian hari. Untuk penelitian dalam bidang sektor publik di Indonesia masih sedikit karena masih banyaknya keterbatasan informasi dan sumber data yang seharusnya dapat dijadikan objek penelitian-penelitian saat ini yang berguna dalam pengembangan profesi dan praktek akuntansi di Indonesia terutama dalam bidang sektor publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah daerah setempat, agar bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan tata kelola keuangan pemerintah setempat terutama dalam pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengalokasian dan penggunaan anggaran yang baik, dapat mencerminkan pemerintah daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik untuk kedepannya.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan referensi atau sarana serta informasi yang berguna dalam melakukan pengawasan atas kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat.
3. Bagi pihak lain atau pihak ketiga, dapat dijadikan sebagai pertimbangan pihak lain dalam berhubungan dengan pemerintah daerah setempat dalam hal pinjaman dana, sumbangan dana, kerjasama dan kegiatan lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Agency Theory, menurut Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Keagenan menjelaskan tentang pelimpahan wewenang dari *principal* ke pihak lain (*agent*) dalam pengambilan keputusan yang dimana dapat menimbulkan perbedaan kepentingan dari tindakan yang dilakukan kedua pihak. Perbedaan tersebut terkadang menimbulkan dua permasalahan penting yaitu *moral hazard*, ketika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati untuk kepentingan bersama dan *adverse selection* yang merupakan dimana pihak prinsipal tidak mengetahui keputusan yang diambil atau informasi yang diperoleh oleh agen. Teori keagenan atau agensi merupakan salah satu dasar dalam ilmu anggaran dan akuntansi.

Dalam bidang sektor publik, terdapat pelimpahan wewenang antara pihak eksekutif dan legislatif. Pembuatan kebijakan baru, pelimpahan anggaran, dan

kesepakatan kontrak merupakan bentuk dari pelimpahan wewenang kedua belah pihak (Arifah, 2012). Menurut Lane (2003) *agency theory* dapat diterapkan dalam organisasi publik, ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen dan Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Perencanaan keuangan di sektor publik terutama pemerintah daerah berupa anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik daerah provinsi, kabupaten, maupun kota. Proses penyusunan tersebut melibatkan pihak eksekutif, legislatif, dan publik. Pihak eksekutif membuat rancangan prioritas anggaran yang kemudian diserahkan ke pihak legislatif untuk dipelajari dan dibahas selanjutnya (Arifah, 2012).

Pengalokasian anggaran untuk tahun berikutnya merupakan suatu perencanaan yang harus dilakukan setiap tahunnya, seperti halnya alokasi belanja modal ditahun selanjutnya yang berdasarkan realisasi pendapatan sebelumnya. Pendapatan yang didapat ditahun sebelumnya beserta pengeluaran (belanja) dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah setempat dalam melakukan pengalokasian untuk belanja ditahun selanjutnya. Untuk itulah tugas dari pihak *agent* dalam melaksanakan tugasnya agar tidak terjadi kesalahan dalam perencanaan anggaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan, pembangunan daerah, dan desentralisasi yang baik apabila direncanakan dengan baik dalam APBD.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD sendiri terdiri atas anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pendapatan daerah.

APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran serta menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber penerimaan daerah untuk membiayain pengeluaran (Halim dan Kusufi, 2012:21).

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Pasal 18 (1) menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Pasal 20 (1) juga menjelaskan Rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan pendukungnya selambat-lambatnya minggu pertama bulan Oktober tahun selanjutnya. Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi selambat-lambatnya pada akhir tahun berjalan yakni 31 Desember. Pemerintah daerah bisa melakukan perubahan atas peraturan daerah tentang APBD nya namun hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu periode

anggaran dan persetujuan perubahan APBD tahun berjalan oleh pemda dan DPRD setempat paling lambat bulan September tahun berjalan anggaran.

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Wikipedia, 2016). Laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik serta jendela informasi yang memungkinkan bagi pihak-pihak di luar manajemen mengetahui kondisi entitas tersebut (Syafitri dan Setyaningrum, 2012).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 30-32), laporan keuangan pemerintah merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara serta para gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah yang meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). LKPP merupakan gabungan seluruh Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKK/L) dengan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) sedangkan LKPD merupakan laporan keuangan masing-masing Pemda.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Berdasarkan PP RI No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 28(1-2) dimana pemerintah daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan serta laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya bulan Juli tahun berjalan. Pasal 31(1) Kepala daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2.1.4 Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin

seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Menurut Halim dan Kusufi (2012:107), belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kewajiban daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal sendiri di dalam pos APBD sendiri yaitu terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, serta belanja aset dan lainnya. Pengalokasian belanja modal dalam anggaran keuangan daerah terutama pada pembangunan infrastruktur sangat penting karena daerah yang memiliki mobilitas penduduk tinggi dan didukung dengan kondisi geografis yang produktif, akan membutuhkan pembangunan infrastruktur yang lengkap sehingga Pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan pengalokasian belanja modal terutama pada pembangunan infrastruktur yang dapat menciptakan lapangan kerja dan akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui beberapa variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) serta kinerja keuangan pemerintah daerah.

\

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan pemerintah daerah yang merupakan semua aliran dana yang masuk ke kas daerah (kasda) dimana bersasal dari beberapa sumber seperti pajak, dana transfer dan lainnya. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah hasil potensi daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah, pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD yang didapatkan oleh daerahnya masing-masing digunakan untuk pengalokasian belanja-belanja ataupun pengeluaran untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan di daerahnya baik belanja operasional maupun belanja modal tergantung persentasinya masing-masing. Setiap daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menggali dan memaksimalkan sumber pendapatan yang ada didaerahnya. Peningkatan PAD dapat mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam otonomi daerah di Indonesia (Halim dan Kusufi, 2012:100)

2.1.6 Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dana perimbangan merupakan dana

yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan disebut juga dana transfer atau *grant* serta disebut juga dengan *intergovernmental revenue*. Dana perimbangan terdiri dari empat jenis, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah didalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (Abdulah dan Halim, 2003).

2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan

kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Wikipedia, 2016). Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kondisi kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa bertambah sehingga terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat. Salah satu tujuan pemerintah daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya.

2.1.8 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran yang nantinya dapat digunakan pada tahun berikutnya. SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Balai Litbang NNT dalam Nurachman, 2015).

2.1.9 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Inpres No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menjelaskan pengertian kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi, organisasi. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku (Halim dan Kusufi, 2012:25). Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis pada kinerja keuangan dilakukan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja diperiode sebelumnya sehingga dapat memperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi kinerja-kinerja yang akan berlanjut (Sularso dan Restianto, 2011).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Susantih dan Seftiana, 2009). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002:121):

1. Memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.

3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Dalam mengukur kinerja keuangan, terdapat beberapa rasio keuangan seperti rasio kemandirian keuangan, rasio efisiensi, rasio efektivitas, desentralisasi fiskal, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

Dalam penelitian ini menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Selain itu, menggunakan rasio efektivitas untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sedangkan untuk rasio efisiensi yaitu menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Sebelum melakukan pengujian, maka ketiga rasio tersebut akan dilakukan analisis faktor untuk mendapatkan satu faktor yang dapat mewakili proksi kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yang membahas pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini, dijelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini:

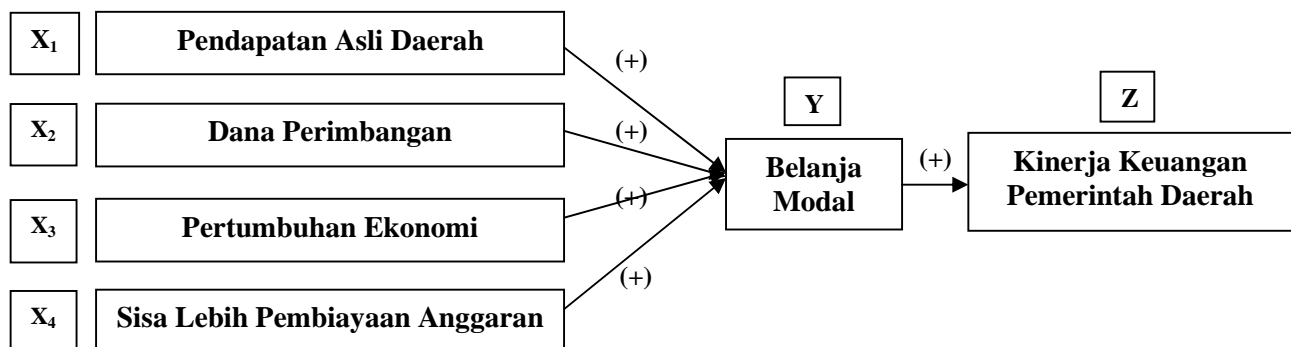
Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Peneliti	Sampel	Variabel	Hasil Penelitian
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	Andueriganta Fadhlihi (2015)	ABPD dan Laporan Realisasi APBD untuk tahun 2009-2013 dan Data PDRB Kabupaten/Kota (11 Daerah Kab/Kota)	X ₁ : PAD X ₂ : Dana Perimbangan X ₃ : Pertumbuhan Ekonomi Y: Belanja Daerah	PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kab se Provinsi Riau	Dihastuti (2014)	Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (12 daerah kab/kota)	X ₁ : DAU X ₂ : PAD X ₃ : SiLPA X ₄ : Luas Wilayah Y: Belanja Modal	Secara parsial DAU dan Luas Wilayah tidak mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan PAD dan SiLPA berpengaruh. Secara simultan DAU, PAD, dan Luas Wilayah mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi	I Putu Ngurah Panji Kartika Jaya, A.A.N.B. Dwirandra (2014)	Laporan Realisasi APBD dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kab/Kota Provinsi Bali tahun anggaran 2006-2011	X ₁ : PAD X ₂ : Pertumbuhan Ekonomi Y: Belanja Modal	PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi hubungan keduanya.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung)	Muhammad Edwin Kadafi (2013)	Laporan Realisasi APBD Kota Bandung untuk Tahun 2005-2010	X ₁ : PAD X ₂ : Dana Perimbangan Y: Belanja Modal	PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli	Darwanto, Yulia Yustikasari (2007)	Laporan Realisasi APBD untuk Tahun 2004-2005 dan Produk	X ₁ : Pertumbuhan Ekonomi X ₂ : PAD X ₃ : DAU	PAD, pertumbuhan ekonomi, dan dana alokasi umum berpengaruh

Daeah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal		Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita	Y: Belanja Modal	signifikan terhadap belanja modal
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal	Gilang Nurachman (2015)	26 daerah kab/kota di Provinsi Jawa Barat	X ₁ : Pertumbuhan Ekonomi X ₂ : SiLPA Y: Belanja Modal	Pertumbuhan ekonomi dan SiLPA berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal (secara parsial). Secara simultan bersama-sama variabel berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
Hubungan antara PAD dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal Pemda Kudus.	Subowo dan Endar Rosida Wati (2010)	Pemerintah Kab. Kudus	X ₁ : PAD X ₂ : Dana Perimbangan Y: Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara PAD dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal.
Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal	Kusnandar dan Dodik Siswantoro (2012)	LHP-BPK, APBD 2011	X ₁ : DAU X ₂ : PAD X ₃ : SiLPA X ₄ : Luas Wilayah Y: Belanja Modal	Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh.
Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah)	Fajar Nugroho dan Abdul Rohman (2012)	Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008-2010	X ₁ : Belanja Modal X ₂ : PAD Y: Kinerja Keuangan	Alokasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan pengaruh alokasi belanja modal secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

2.3 Kerangka Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah

Kusnandar dan Siswanto (2012) membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Prosentase PAD relatif rendah terhadap total pendapatan daerah dalam kisaran 7% namun kontribusi prosentase tersebut sangat berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Kadafi (2013), dan Jaya dan Dwirandra (2014) yang memperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Tidak semuanya, terdapat beberapa penelitian seperti Paujiah (2012) dan Wandira (2013) yang mendapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal. Itu terjadi disebabkan karena penggunaan dana

lebih banyak dialokasikan ke dalam belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal.

Pendapatan asli daerah yang merupakan hasil penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerahnya sendiri. Bertambahnya infrastruktur dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dapat menyebabkan memacu peningkatan perekonomian daerah dan akan merangsang para penduduk untuk meningkatkan pendapatannya sendiri, seiring dengan peningkatan pendapatan asli daerahnya. Dengan semakin besarnya pendapatan asli daerah maka akan berdampak meningkatkan belanja modal untuk pembangunan di masing-masing daerah. Perbedaan yang terjadi pada penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten yang menjadi alasan pengukuran pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal lebih khususnya di Sumatera. Berdasarkan pembahasan di atas maka hipotesis pertama:

H_1 : *Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah.*

2.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah

Seiring berjalannya proses otonomi daerah, dana perimbangan masih memiliki persentasi yang besar dalam sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya sendiri. Sejumlah dana transfer dari pemerintah pusat tersebut banyak yang dialokasikan oleh para pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan perbaikan pelayanan

umum di daerah masing-masing. Menurut Abdullah dan Halim (2003) bahwa dalam jangka panjang transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat mengurangi belanja modal.

Menurut Susilo dan Aji (2007) kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) menjadi semakin tinggi.

Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini.

Pernyataan sebelumnya sejalan dengan hasil penelitian Kadafi (2013) dan Yadia (2014) menunjukkan dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal dibandingkan dengan PAD. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis kedua, yaitu:

H_2 : *Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah.*

2.4.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah

Pembangunan daerah berkaitan erat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Adanya pembangunan di daerah maka akan secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pembangunan daerah. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, berarti ada sejumlah peningkatan atas pendapatan disuatu daerah dibanding tahun sebelumnya sehingga pertumbuhan ekonomi juga sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun,

peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan mengakibatkan pengalokasian anggaran belanja daerah yang semakin dinamis (Fadhlihi, 2015).

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun alokasi belanja modal (Darwanto dan Yustikasari, 2007; Lin dan Liu, 2000; Nugroho, 2010)

Menurut hasil penelitian Jaya dan Dwirandra (2015), pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di provinsi Bali, berbeda dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) dan Nurachman (2015) yang menghasilkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal untuk masing-masing daerah kab/kota di provinsi Jawa Barat dan se-Pulau Jawa dan Bali.

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan salah satu pendapatan disuatu daerah dan apabila meningkat, maka akan secara langsung mempengaruhi tingkat pengeluaran dalam hal ini pengalokasian belanja modal di daerah Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang ketiga, yaitu:

H_3 : *Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah.*

2.4.4 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran selama satu periode anggaran yang nantinya dapat digunakan pada tahun berikutnya. Menurut Kurniawan (2010) pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Untuk itu, besarnya SiLPA seharusnya dipandang sebagai tambahan pembiayaan untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada belanja yang lebih produktif, seperti belanja modal. Berdasarkan hasil dua penelitian oleh Dihastuti (2014) menjelaskan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal untuk kabupaten/kota di Riau, sedangkan Nurachman (2015) di kabupaten/kota Jawa Barat.

SiLPA tahun anggaran mencakup pelampauan penerimaan total pendapatan, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan total belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Apabila terjadi sisa anggaran pada akhir periode maka sisa anggaran dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan maupun belanja untuk tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis keempat:

H₄ : *Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah.*

2.4.5 Pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah dan pengalokasian belanja modal tidak hanya ditujukan untuk pengembangan infrastruktur industri, tetapi juga ditujukan untuk berbagai infrastruktur jasa yang langsung terkait dengan pemberian layanan kepada publik (Adi, 2007). Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Pertumbuhan pembangunan yang dipacu oleh pemerintah daerah setempat akan berdampak pada kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dari daerah atau PAD yang menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut (Florida, 2007)

Berdasarkan penelitian Purba (2006) yang membuktikan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro di Kabupaten Simalungun dan penelitian Sjoberg (2003) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara pengeluaran pemerintah untuk konsumsi dan investasi dengan kinerja ekonomi makro di Swedia selama kurun waktu 1960-2001.

Hal itu juga sejalan dengan penelitian Patriati (2010) bahwa *expenditure* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan Al Qadar

(2014) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bone Bolango. Berbeda dengan penelitian Nugroho dan Rohman (2012) alokasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan dengan uraian diatas, maka hipotesis selanjutnya, yaitu:

H₅ : *Alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja kinerja keuangan pemerintah daerah.*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi, menurut Indriantoro dan Supomo (2003) adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung).

Sedangkan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota yang bukan daerah pemekaran baru atau sudah berdiri selama lima tahun.
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berupa Laporan Realisasi Anggaran yang telah diaudit untuk tahun 2009-2013.
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia untuk tahun 2010-2014.

4. Kabupaten/Kota menyerahkan data PDRB di Badan Pusat Statistik.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder keuangan yaitu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Bagian Selatan yang telah diaudit untuk tahun 2009-2013 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai dari tahun 2010- 2014. yang bersumber dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau dari masing-masing situs resmi disetiap kabupaten/kota serta data pertumbuhan ekonomi di *website* Badan Pusat Statistik (BPS).

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang bergantung atau dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang bebas. Menurut Indriantoro dan Supomo (2003). variabel dependen merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel yang diduga sebagai akibat dari variabel independen.

a. Belanja Modal

Dalam model regresi I, variabel dependennya adalah belanja modal pemerintah daerah. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal gedung dan

bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja modal pemerintah daerah dapat dilihat dari total belanja modal di pos belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota.

b. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan dua rasio keuangan daerah yaitu:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim dan Kusufi, 2012)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Dana Pusat/Provinsi}}$$

Sumber: *Akuntansi Keuangan Daerah (Halim, 2012)*

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Nilai efektivitas dari kemampuan daerah tersebut dilihat dari 1-100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Pengukuran rasio efektivitas menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Realisasi Target PAD}}$$

Sumber: *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah (Munir, 2004)*

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan daerah. Dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100 persen. Semakin kecil rasio berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Pengukuran rasio efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

Sumber: *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah (Munir, 2004)*

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel bebas yang bisa mempengaruhi, menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independennya, yaitu pendapatan asli daerah (X_1), dana perimbangan (X_2), pertumbuhan ekonomi

(X_3), sisa lebih pembiayaan anggaran (X_4), dan alokasi belanja modal (Y) menjadi variabel independen saat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah (Z).

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang berasal daerah masing-masing yang akan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan dan dipungut atau didapat berdasarkan peraturan daerah. Menurut Halim dan Kusufi (2012:101), bahwa pendapatan asli daerah yang bersumber dari sumber ekonomi asli daerah itu sendiri. PAD juga sebagai dana pembiayaan untuk pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif. PAD sendiri bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pengukuran PAD dapat dilihat dari total PAD untuk masing-masing kabupaten/kota yang bersumber dari data Laporan Realisasi Anggaran dalam pos pendapatan seperti berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-Lain PAD yang sah}$$

Sumber: *Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010*

b. Dana Perimbangan

Selain pendapatan yang didapat dari hasil daerahnya masing-masing, terdapat dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tujuan pemerintah pusat dalam memberikan dana ini untuk keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Total dana

perimbangan ini dihitung dari dana yang ada di Laporan Realisasi APBD dibagian dana keseimbangan dalam pos pendapatan.

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{DAU} + \text{DAK} + \text{DBH Pajak} + \text{DBH SDA}$$

Sumber: *Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010*

c. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi daerah diprosikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yaitu totalitas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara riil di suatu daerah dengan mengabaikan laju inflasi (Kuncoro, 2004).

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}}$$

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2015*

d. **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

dalam APBN/ APBD selama satu periode pelaporan. Pengukuran variabel ini dengan cara:

$$\text{SiLPA} = \text{Surplus/Defisit} - \text{Pembiayaan Neto}$$

Sumber: *Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010*

Tabel 3.1
Daftar Variabel-Variabel dalam Penelitian dan Indikatornya

Notasi	Variabel	Indikator
X ₁	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan Asli Daerah
X ₂	Dana Perimbangan	Total Dana Perimbangan
X ₃	Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}}$
X ₄	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Surplus/Defisit – Pembiayaan Neto
Y	Belanja Modal	Total Belanja Modal
Z	Kinerja Keuangan	
	1.Rasio Kemandirian	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Dana Pemerintah Pusat/Provinsi}}$
	2.Rasio Efektivitas	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$
	3. Rasio Efisiensi	$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Analisis Faktor

Analisis faktor dilakukan bertujuan untuk mendefinisikan struktur data atau menganalisis struktur yang saling berhubungan antara sejumlah variabel dengan mendefinisikan satu set kesamaan variabel atau dimensi yang sering disebut faktor (Ghozali, 2013:393). Analisis faktor menghendaki adanya korelasi yang cukup dalam matriks data agar dapat dilakukan faktor analisis. Agar bisa atau tidaknya

dilakukan faktor analisis adalah dengan melihat matriks korelasi secara keseluruhan dan untuk menguji adanya korelasi antar variabel digunakan Uji *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO) dan Uji *Barlett's Test of Sphericity* (Ghozali, 2013:397), dengan syarat seperti:

1. Hasil dari Uji *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO) diatas 0,5
2. Hasil signifikansi Uji *Barlett's Test of Sphericity* harus dibawah 5% atau 005.

Jika nilai kedua tersebut terpenuhi, maka analisis faktor dapat dilanjutkan dan selanjutnya akan didapatkan hasil *factor score* yang dilihat dari *anti-image matrice*, *total variance explained*, dan *component matrix*.

3.4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data sehingga dapat memberikan suatu informasi berdasarkan keadaan umum (Kadafi, 2013). Selain itu, statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum (*min*), nilai maksimum (*max*), nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi mengenai variabel independen dan dependen yang di jabarkan dalam bentuk statistik (Ghozali, 2013:19).

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji data-data dengan menggunakan regresi liner berganda. Pengujian statistik yang menggunakan analisis regresi dapat dilakukan dengan pertimbangan tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut yaitu data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013:160).

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan grafik histogram dan *normal probability plot* dimana dilakukan pebandingan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dalam uji normalitas ini dilakukan pula *One-Sample Kolmogorov Smirnov* dengan tingkat signifikansi 0,05. Dasar pengambilan keputusan:

1. Bila *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka data berdistribusi normal.
2. Bila *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan menguji apakah suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1

(sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi dalam suatu model regresi maka dalam penelitian ini digunakan *Durbin Watson Test (DW-Test)* dengan ketentuan $dU < DW < 4-dU$ (Ghozali, 2013:110).

Dasar pengambilan keputusan:

Tabel 3.2
Pengukuran Autokorelasi *Durbin-Watson (DW-Test)*

Nilai d	Keterangan	Keputusan
$0 < DW < dL$	Tidak Ada Autokorelasi Positif	Tolak
$dL < DW < dU$	Tidak Ada Autokorelasi Positif	Tanpa Keputusan
$4 - dL < DW < 4$	Tidak Ada Korelasi Negatif	Tolak
$4 - dU < DW < 4 - dL$	Tidak Ada Korelasi Negatif	Tanpa Keputusan
$dU < DW < 4 - dU$	Tidak Ada Autokorelasi, Positif atau Negatif	Tidak Ditolak

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Pengujian ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau nilai *VIF* > 10 (Ghozali, 2013:107).

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian dilakukan melalui pengamatan pola pada grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependent) dengan residualnya. Model regresi dikatakan heteroskedastisitas ketika titik-titik data pada grafik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2013:139).

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis linier berganda, dimana analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

Penggunaan regresi linier berganda untuk mengukur seberapa besar hubungan variabel independen dan variabel dependen sehingga dapat membedakan kedua variabel dalam penelitian (Ghozali, 2013:96).

$$\mathbf{BM} = + \mathbf{}_1\mathbf{PAD} + \mathbf{}_2\mathbf{DANPER} + \mathbf{}_3\mathbf{PE} + \mathbf{}_4\mathbf{SiLPA} +$$

$$\mathbf{KK} = + \mathbf{}_1\mathbf{BM} +$$

Keterangan:

BM = Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DANPER	= Dana Perimbangan
PE	= Pertumbuhan Ekonomi
SiLPA	= Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
KK	= Kinerja Keuangan
	= Koefisien Regresi Variabel Independen
	= Konstanta
	= <i>Error of estimation</i>

3.4.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan alat statistik SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 21.0. Dalam menguji hipotesis dilakukan untuk menyatakan hubungan antar variabel dependen, yaitu Y (belanja modal) dengan variabel independen, yaitu X (pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, dan sisa lebi pembiayaan anggaran) dan hubungan antara variabel Y dan Z (kinerja keuangan).

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai R^2 , maka semakin terbatas kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Penelitian ini juga menggunakan *Adjusted R Square* ($Adj R^2$) karena terdapat lebih dari satu variabel independen dan apabila hanya ada satu variabel independen maka menggunakan *R Square* (R^2) dalam menjelaskan pengaruh variabel independennya (Ghozali, 2013:97).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

F-test digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja modal. F-test juga digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2013:98). Kriteria pengujiannya (Uji-F) adalah seperti berikut ini:

1. H_0 ditolak yaitu apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai $0,05$ berarti model regresi dalam penelitian ini tidak layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian.
2. H_0 diterima yaitu apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ atau bila nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan nilai $0,05$ berarti model regresi dalam penelitian ini layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian.

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian signifikansi parameter individual ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempengaruhi variabel terikat dengan asumsi variabel independen lainnya konstan (Ghozali, 2013:98). Kriteria pengujian hipotesis adalah seperti berikut ini:

1. H_0 ditolak, yaitu apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai $0,05$ berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. H_a diterima, yaitu apabila p value = 0.05 atau bila nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan nilai $0,05$ berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh faktor-faktor yang diproksikan dalam pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah serta pengaruh alokasi belanja modal terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dalam rasio kinerja kemandirian keuangan pada tahun 2010-2014. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda sebagai alat analisis hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar PAD yang didapat pemerintah daerah maka tidak akan mempengaruhi alokasi belanja modal periode selanjutnya.
2. Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dana perimbangan yang didapat pemerintah daerah dari pemerintah pusat, maka akan mempengaruhi pengalokasian belanja modal periode selanjutnya dan

pada dasarnya dana perimbangan dialokasikan untuk peningkatan pembangunan.

3. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa apabila tingkat pertumbuhan ekonomi naik, maka tidak akan mempengaruhi pemerintah daerah dalam pengalokasian belanja modal periode selanjutnya.
4. Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa apabila SILPA yang didapat meningkat, maka pengalokasian belanja modal akan meningkat dan pada dasarnya SiLPA digunakan untuk keperluan dan pembiayaan pada periode selanjutnya.
5. Alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal tersebut menunjukkan bahwa apabila pengalokasian belanja modal yang ditingkatkan akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah terutama dalam tingkat kemandirian keuangan pada periode berjalan.

5.2 Ketebatasan Penelitian

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan empat faktor dalam mempengaruhi alokasi belanja modal, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sedangkan masih banyak faktor keuangan atau non-

keuangan lainnya yang dapat mempengaruhi pengalokasian belanja modal agar dapat meningkatkan hasil yang lebih signifikan.

2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga rasio keuangan daerah, yaitu rasio kemandirian keuangan, efektivitas, dan efisiensi. Pemakaian ketiga rasio tersebut dikarenakan ketiganya memiliki ciri yang sama untuk dipakai dalam analisis faktor.
3. Adanya beberapa kabupaten/kota baru di Sumatera setelah tahun 2008 sehingga berkemungkinan membuat perbedaan varians data yang cukup signifikan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, kesimpulan, dan keterbatasan pada penelitian ini, ada beberapa saran-saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah faktor lain yang mempengaruhi alokasi belanja modal pemerintah daerah baik faktor keuangan dan non keuangan seperti ukuran pemerintah daerah dan tingkat inflasi. Serta menambahkan faktor lain juga dalam mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah selain belanja modal, seperti belanja pegawai dan karakteristik pemerintah daerah.
2. Menjadikan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel kontrol.
3. Untuk peneliti selanjutnya, apabila penggunaan alokasi belanja modal dan dibandingkan dengan realisasinya memiliki tingkat varians yang cukup

besar, maka sebaiknya menggunakan data realisasi belanja modal agar lebih menggambarkan keadaan belanja modal yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSAKA

- Abdullah, Sukriy dan Halim, Abdul. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaen/Kota di Jawa dan Bali. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI*, 16-17.
- _____ dan Junita, Afrah. 2015. Bukti Empiris tentang Pengaruh *Budget Ratcheting* terhadap Hubungan antara Pendapatan Sendiri dan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh. Medan. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- _____ dan Rona, Riza. 2015. Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal: Studi atas Perubahan Anggaran Kabupaten/Kota di Indonesia. Makalah Dipresentasikan pada Konferensi Ilmiah Akuntansi ke-II, IAI Wilayah Jawa Timur, di Universitas Kanjuruhan Malang, 29-30 April 2015.
- Adi, Priyo Hari. 2007. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa Bali). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol. 8(1): 1450 -1465.
- Al Qadar, Azis. Noholo, Sahmin dan Yusuf, Nilawaty. 2014. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. *KTM Fakultas Ekonomi & Bisnis*, 2(1).
- Arifah, Dista Amalia. 2012. Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik. *Jurnal Prestasi* Vol. 9(1): 85-95.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2012. Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2007-2011 Buku 1 Pulau Sumatera. *Publikasi Online Badan Pusat Statistik*.
- _____. 2013. Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2009-2012 Buku 1 Pulau Sumatera. *Publikasi Online Badan Pusat Statistik*.
- _____. 2014. Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2010-2013 Buku 1 Pulau Sumatera. *Publikasi Online Badan Pusat Statistik*.

- _____. 2015. Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2011-2014 Buku 1 Pulau Sumatera. *Publikasi Online Badan Pusat Statistik*.
- _____. 2015. Indikator Makro Ekonomi Regional Provinsi Lampung 2014. *Publikasi Online Badan Pusat Statistik*.
- Darwanto, dan Yustikasari Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Makassar. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Dihastuti. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kab se Provinsi Riau. *Disertasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Fadhlihi, Andueriganta. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Daerah. Lampung. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Farel, Rully. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor. *SIGNIFIKAN: Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol 4(2): 189-210.
- Florida, Asha. 2007. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Dan Kota di Propinsi Sumatera Utara. *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M. Syam. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____ dan Abdullah, Syukriy. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2(1): 53-64.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika dan Dwirandra, A. A. N. B. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan

Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol 7(1): 79-92.

- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3(4): 305-360.
- Kadafi, Muhammad Edwin. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, Agus. 2010. Analisis Alokasi Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Universitas Padjajaran*.
- Kusnandar dan Siswantoro, Dodik. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Symposium Nasional Akuntansi XII Banjarmasin*.
- Laksmi, Paramita Ratri dan Hadi, Syamsul. 2013. Pengaruh PAD, DAU, SiLPA, Realisasi Anggaran dan Tanggal Penetapan Perda APBD terhadap Anggaran Pembangunan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah-D. I. Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 8(1).
- Lane, Jan-Erik. 2003. Management and Public Organization: The Principal-Agent Framework. *Working Paper*. University of Geneva and National University of Singapore.
- Lin, Justin Yifu and Liu, Zhiqiang. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change* Chicago. Vol. 49: 1-21.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Munir, D. Dan Djuanda, H. A. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Nurachman, Gilang. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

- Nugroho, Fajar dan Rohman, Abdul. 2012. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 47-59.
- Paujiah, Sri Puji. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Siliwangi.
- Purba, Adearman. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Tesis*. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- Republik Indonesia. 1999. *Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta. DPR RI.
- _____. 1999. *Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta. DPR RI.
- _____. 2003. *Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta. DPR RI.
- _____. 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta. DPR RI.
- _____. 2004. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta. DPR RI.
- _____. 2005. *Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan*. Jakarta. Presiden RI.
- _____. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. Presiden RI.
- _____. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. Presiden RI.
- Saftiana, Yulia dan Susantih, Henry. 2008. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan. *Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang*.
- Sjoberg, Peter. 2003. Government Expenditures Effect on Economic Growth The Case of Sweden 1960-2001. *Thesis*. Lulea University of Technology.
- Subowo dan Wati, Endar Rosida. 2010. Hubungan antara PAD dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal Pemda Kudus. *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol. 2(2) 73-82.

Sularso, Havid dan Restianto, Yanuar E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi* Vol. 1(2): 109-124.

Sugiardi, Ni Putu Dwi Eka dan Supadmi, Ni Luh. 2014. Pengaruh PAD, DAU, SiLPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol 7(2): 477-497.

Susilo, Gideon Tri Budi dan Adi, Priyo Hari. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah). *Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama, Surabaya*.

Syafitri, Febriyani dan Setyaningrum, Dyah. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol 9(2).

Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2(1): 44-51.

Yadia, Ilham Sukma. 2014. Pengaruh Variabel Penerimaan Daerah terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan diakses pada 04-04-2016

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi diakses pada 24-02-2016

<http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen> diakses pada 19-02-2016